

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Apridar, Muhammad Karim, dan Suhana. *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Statistik Indonesia 2016*. BPS Indonesia, 2016.
- Djoko Tribawono. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Safri Burhanuddin. *Transformasi WPP untuk Meningkatkan Kinerja Perikanan*. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jakarta: 2020.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Inonesia,, 2013.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- I Nyoman Nurjaya, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2015.

Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Panitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

M. Umar Maskum, dkk. *Cara Mudah Menghadapi Kasus-Kasus Hukum*. Ansor Press: Kulon Progo.

Rumaida, M.Y. *Potensi dan Ancaman Sumber Daya Pesisir dan Laut Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Bintan: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Wahju Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep.38/Men/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Retribusi Usaha Perikanan.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum.

Jurnal

Aqmal Romi. *“Adaptasi Buruh Nelayan Kelong Apung pada musim Paceklik Desa Pengudang Kabupaten Bintan”*. Jurnal Masyarakat Maritim. Vol 4(1). 2020

Kadriani dan La Harudu. *“Persepsi Masyarakat Nelayan Tentang Pentingnya Pendidikan Formal Di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali”*. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi. Vol 1 No. 1. 2017

Muhadar, Abd. Asiz, dan NuAzisa. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Bidang Perikanan (Studi Kasus di Kabupaten Pangkajene Kepulauan)*. Jurnal Penelitian Hukum Vol 2 No.1. 2012

Rusdi Syukur. Tumpang Tindih Penyidikan Pada Tindak Pidana Perikanan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* Vol 16. 2008

Saleh Muliad. *Jurnal: Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Fiat Justitia *Jurnal Ilmu Hukum*. Palu. 2008

Skripsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Bintan dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). LAPORAN AKHIR: Penelitian Dampak Pemberian Bantuan Terhadap Pendapatan Nelayan/Pembudidaya Di Kabupaten Bintan. STISIPOL Raja Haji. 2018

Mohammad Ruda Ilbaya. Pertanggungjawaban atas Delik Kealpaan yang dilakukan oleh Oknum Polri yang Mengakibatkan Luka Berat. dalam Skripsi. Makassar. 2013

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/24/jumlah-nelayan-indonesia-menurun-sejak-2017>

<https://m.tempo.co/read/news/2014/11/01/090618747/fakta-fakta-seputar-pencurian-i>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita>

<https://www.hariankepri.com/kementerian-kkp-tetapkan-138-ribu-hektar-perairan-bintan-jadi-kawasan-konservasi/>